



LAPORAN
EVALUASI MANDIRI CAPAIAN KINERJA MELALUI E - PERFORMANCE
TRIWULAN IV 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

A. Pendahuluan :

1. Umum

Sebagai wujud menciptakan good governance dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan yang baik, dan saat ini sistem manajemen yang baik lebih difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala. Evaluasi kinerja dilaksanakan pada capaian Perjanjian Kinerja (E-Performance), Realisasi Anggaran, Progres Pembangunan Zona Integritas, serta capaian-capaian kinerja lainnya. Evaluasi kinerja bukan sekadar untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan program kerja, namun juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan target program kerja periode selanjutnya. Oleh karena itu pada kesempatan pelaksanaan kegiatan ini digunakan sebagai momentum ajang diskusi antar Satuan Kerja untuk membahas hasil (outcome) kinerja yang telah dicapai dan penetapan prioritas program kerja periode selanjutnya. Dengan alasan tersebut di atas serta concern terhadap capaian kinerja dan percepatan pelaksanaan program kerja selanjutnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

2. Maksud dan Tujuan :

● **Maksud :**

Laporan Capaian Kinerja melalui E - Performance Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur disusun dengan maksud untuk melihat progress capaian dan kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

● **Tujuan :**

1. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
2. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja.

3. Seluruh Divisi dapat mengekspose evaluasi capaian kinerjanya secara berkala;
4. Percepatan Pengendalian Kinerja di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan Terpetakannya permasalahan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

5. Ruang Lingkup :

Laporan Capaian Kinerja melalui E- Performance Atas Percepatan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025 membahas tentang Capaian, Kendala, dan Strategi dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja selama Triwulan IV Tahun 2025.

6. Dasar :

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- h. Keputusan Menteri Hukum Nomor [M.HH-06.OT.01.01](#) TAHUN 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum;
- i. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nomor SEK.1.PR.03-51 Tanggal 24 Februari 2025 Tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP Kementerian Hukum Tahun 2025;
- j. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : SEK-OT.03.03-09 tanggal 12 Februari 2025 hal Penyampaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025;

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan:

E - Performance atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur merupakan strategi percepatan pelaksanaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Kantor Wilayah telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja secara berjenjang dan menyusun Indikator Kinerja Utama yang memenuhi kriteria SMART dan telah disampaikan melalui <https://drive.google.com/drive/folders/1lr1l2XbwI9l1Yrb0byvrySMwv79CLBm4>

Adapun penandatanganan perjanjian kinerja tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memiliki 14 Sasaran Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi/ Kepala/Bagian dengan Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut pada 31 Juli 2025 telah disusun Rencana Aksi atas capaian perjanjian kinerja. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Dan menindaklanjuti dari hasil bagian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Tahun 2025 Kementerian Hukum pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2025 yang bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum telah ditetapkan 40 target capaian kinerja Kementerian Hukum hingga akhir tahun yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor [M.HH-06.OT.01.01](#) TAHUN 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur kemudian melaporkan Capaian Kinerja dan Rencana Aksi atas PK melalui Aplikasi <https://performance.kemenkumham.go.id/>

Selanjutnya dilakukan pengisian matrik tersebut per triwulan dengan rincian sebagai berikut:

- Triwulan I diisi paling lambat tanggal 10 April 2025;
- Triwulan II diisi paling lambat tanggal 10 Juli 2025;
- Triwulan III diisi paling lambat tanggal 10 Oktober 2025;
- Triwulan IV diisi paling lambat tanggal 10 Januari 2026.

Selanjutnya, Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan pengisian matrik rencana aksi atas perjanjian kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan pada tanggal 10 (sepuluh) di setiap bulan setelah triwulan berakhir.

C. Hasil yang Dicapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memiliki 14 Sasaran Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan 40 target Rencana aksi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Divisi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Rencana Aksi
1.	Bagian Umum dan TU	1	1	21
2.	Divisi Pelayanan Hukum	6	8	11
3.	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	7	9	8
Jumlah		14	18	40

MATRIK CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TW IV TA 2025

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada periode Januari hingga Oktober 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melaksanakan kinerja berdasarkan **Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Renstra Kemenkumham Tahun 2020–2024**. Dalam ketentuan tersebut, Kanwil melaksanakan **14 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** sebagai dasar perencanaan dan pengukuran kinerja.

Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025 telah diterbitkan **Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkum Tahun 2025–2029**. Regulasi baru ini menetapkan bahwa Kanwil melaksanakan **15 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan**, dengan beberapa penyesuaian struktur, penyederhanaan indikator, serta penguatan fokus pada layanan digital dan program prioritas kementerian. Adapun hasil capaian atas perjanjian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

DIPA	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (Realisasi/Target)	Alasan Tercapai/Tidak Tercapai dan Strategi Kantor Wilayah
Setjen (2 Sasaran, 2 Indikator)	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%/100% x 100% =100% (Tercapai)	Dari total 7 Rekomendasi BPK terkait pemeriksaan KAS, Aset Tetap dan Belanja pada Kantor Wilayah Jawa Timur telah ditindaklanjuti seluruhnya (7 Tindak Lanjut) melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor W.15-KU.02.01-703 tanggal 27 Nopember 2025 hal Tanggapan Resume Hasil Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum TA. 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Kantor Wilayah Jawa Timur https://intip.in/TLBPK2025 Terhadap capaian Tindak Lanjut Temuan BPK, strategi Kanwil diarahkan pada penguatan tata

						kelola keuangan melalui penegasan SOP pengelolaan kas, aset, dan belanja, serta konsistensi rekonsiliasi berjenjang untuk mencegah terulangnya temuan. Selain itu, Kanwil memperkuat kapasitas SDM pengelola keuangan, meningkatkan pengawasan internal secara proaktif, dan menata dokumentasi tindak lanjut agar lebih sistematis serta siap audit. Langkah-langkah ini menjadi strategi preventif dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan memastikan pemeriksaan berikutnya berjalan lebih baik, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan di lingkungan Kanwil.
Realisasi IKU <i>Jumlah rekomendasi TL BPK yang ditindaklanjuti kemenkum</i> $= \frac{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK yg diberikan BPK pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah rekomendasi TL BPK}} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$						
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,81 Indeks	3,80 Indeks	$\frac{3,80}{3,81} \times 100\% = 99,73\%$ (Belum mencapai target)		Pada Survei Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) perhitungan dilakukan oleh Unit Eselon I BSK dan menghasilkan capaian sebesar 3,80 indeks dari target 3,81 indeks. https://drive.google.com/drive/folders/11Ui9RAOMP-vZIA2Z4Gt0KMpc2Uol0URm Namun demikian, laporan Unit Eselon I BSK tidak menyajikan bagaimana perhitungan maupun aspek/kriteria penilaian yang menyebabkan nilai indeks tersebut belum optimal. Capaian yang kurang maksimal ini diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya jumlah responden serta beberapa aspek layanan kesekretariatan khususnya terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kepuasan pegawai. Oleh karena itu, pada pengisian ILK periode

					berikutnya, Kantor Wilayah akan terus mendorong partisipasi penuh seluruh pegawai untuk mengisi kuesioner serta menindaklanjuti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana melalui pengusulan belanja modal Tahun 2026 dan 2027, mengingat pada tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran. Saran untuk BSK Kemenkum RI Agar laporan penyampaian hasil Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) dapat memberikan nilai tambah yang lebih kuat bagi Kantor Wilayah, disarankan agar BSK menyertakan catatan dan analisis evaluatif secara rinci pada setiap aspek layanan yang dinilai. Penyajian analisis ini penting terutama untuk mengidentifikasi area yang menjadi penyebab capaian indeks belum optimal. Dengan adanya penjelasan mengenai faktor penghambat, pola temuan, serta rekomendasi perbaikan pada tiap aspek layanan, Kantor Wilayah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kelemahan yang perlu ditindaklanjuti. Analisis yang lebih terstruktur dari BSK juga akan membantu Kantor Wilayah dalam melakukan upaya perbaikan kualitas layanan kesekretariatan secara lebih terukur pada periode berikutnya. Selain itu, catatan evaluatif tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan layanan internal, peningkatan kompetensi pegawai, serta penyesuaian terhadap standar operasional yang berlaku. Dengan demikian, laporan ILK tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian capaian angka indeks, tetapi sekaligus menjadi instrumen pembinaan, penguatan kualitas layanan, dan peningkatan kinerja
--	--	--	--	--	--

						kesekretariatan secara berkelanjutan.
	Hasil Survey oleh Unit Eselon I BSK					
Administ rasi Hukum Umum (AHU) (2 Sasaran, 2 Indikator)	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,20 Indeks	3,20/3,20x100%= 100% (Tercapai)	Pada survei layanan Indeks Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah Jawa Timur mencapai nilai 3,20 dari 3,20 yang telah ditargetkan. Bahwa saat ini loket layanan AHU didukung oleh 5 PNS dan 3 Helpdesk, SDM yang ada telah memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya masing-masing baik terkait dengan kenotariatan, badan usaha, apostille, legalisasi, pewarganegaraan, PPNS dan layanan konsultasi lain yang berkaitan dengan layanan AHU. Pada loket layanan AHU, juga disediakan layanan anjungan mandiri / <i>self service</i> , sehingga pemohon dapat segera melakukan proses layanan secara online melalui website ahu.go.id dengan dipandu oleh petugas loket. Selain itu, media sosial Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur juga sering menyampaikan jenis-jenis layanan, persyaratan dan tata cara pelaksanaan layanan sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Nilai tersebut tentu selaras dengan pendapatan PNPB layanan AHU yang meningkat sebesar 16% bila dibandingkan dengan tahun 2025.
	Hasil Survey AHU					
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan	98,1 %	100%	100/98,1x100%= 101,94% (Capaian melebihi target)	Terdapat 223 permohonan yang sudah masuk di MKN, dan yang sudah selesai 223 perkara. Link folder pemeriksaan perkara pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur:

	Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	n Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah				https://drive.google.com/drive/folders/1Mjl4vOs0TWgMj_Kj-Xtp1pc6rG6Q0PPy?usp=drive_link Pada tahun 2025 terdapat 17 Perkara yang masuk di Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut: 12 perkara: Selesai 5 perkara: dalam proses pemeriksaan sesuai dengan jadwal pemeriksaan dan akan selesai sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Link folder pemeriksaan perkara pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur: https://drive.google.com/drive/folders/1rLKKI-flGHTLSkiWmK4ODNoF1-HU8wrZ?usp=drive_link
	$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\% =$ $(223+17)/(223+17) = 100\%$					
Kekayaan Intelektual (KI) (3 Sasaran, 3 Indikator)	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	99,2%	116,7% (capaian melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	https://drive.google.com/file/d/1sPTHw2sC_d66g60FBGUg7HIPkB5hFLMZ/view?usp=drivesdk Dari total 271 layanan konsultasi yang ditangani di Kantor Wilayah, sebanyak 269 layanan telah dinyatakan selesai, sedangkan 2 layanan lainnya masih memerlukan kelengkapan lebih lanjut karena dokumen pendukung sebagai persyaratan administrasi belum sepenuhnya dilampirkan.
	$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yg patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Total layanan perlindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$ $= 269/271 \times 100\% = 99,2\%$					

	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	$100\%/30\% \times 100\%$ $= 333\%$ (capaian melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	Pada tahun 2025 hanya ada 1 laporan yang melibatkan kantor wilayah. Yaitu LP HKI.7.KI.08.01-01.01.27-LP. Yang mana selesai dengan mediasi pada tanggal 1 Desember 2025. Link laporan pengaduan : https://drive.google.com/drive/folders/1LJZX1njKXdCwSCgikMcgVvytbNbvUJOJ?usp=sharing
	Realisasi IKU = $\frac{\text{Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani}}{\text{Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan}} \times 100\%$ $= 1/1 \times 100\% = 100\%$					
	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 level	3,24 level	$3,24 \text{ level} / 2,30 \text{ level} \times 100\%$ $= 140,86\%$ (Melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	Capaian nilai maturitas KI Jawa Timur tahun ini mencapai 3,24, melampaui target 2,30 yang telah ditetapkan. Meski demikian, peningkatan menuju Level 4 tetap sangat memungkinkan melalui koordinasi awal yang lebih solid dan terstruktur dengan para responden eksternal.
	Hasil Survey Maturitas oleh Ditjen KI					

Peraturan Perundang-undangan (PP) (1 Sasaran, 2 Indikator)	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangn daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangn di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	=100%/100% =100% (Tercapai)	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangn daerah di wilayah yaitu dengan adanya Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota) yang secara keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) dan telah diselesaikan keseluruhan yaitu 40 (empat puluh). Analisa/Kegiatan yg mendukung tercapainya target kinerja : faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah adanya distribusi pekerjaan yang merata ke setiap tim kerja, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, terdapat batas waktu dalam setiap kegiatan sehingga bisa terukur dan dijadikan pedoman.
	$WF_{Ren} = \left(\frac{WF_{pv} + WF_{kk}}{\sum F_{pv} + \sum F_{kk}} \right) \times 100\%$ = (0+40)/(0+40) x 100% = 100% Dimana: WF_{pv} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi) ∑F_{pv} = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi WF_{kk} = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota) ∑F_{kk} = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota					

		Persentas e Perancan gan Peraturan Perundan g-Undang an di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementeri an Hukum	100%	100%	$100\%/100\% \times 100\%$ =100% (Tercapai)	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah yaitu Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum yaitu sebanyak 1472 yang merupakan gabungan dari raperda dan raperkada, dimana semua permohonan tersebut telah dilakukan harmonisasi. Analisa/Kegiatan yg mendukung tercapainya target kinerja : Distribusi beban pekerjaan secara merata pada masing-masing tim kerja, penjadwalan permohonan harmonisasi secara berkala, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penjadwalan harmonisasi agar bisa cepat diberikan solusi apabila ada kendala dan menjaga kekompakan .
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (4 Sasaran, 4 Indikator)	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentas e Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksan aan Peraturan Daerah yang Ditindakla njuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	75%	$75\%/10\% \times 100\%$ =750% (capaian melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	Dari total 8 jumlah anev pelaksanaan perda yang disampaikan kepada pemda, total 6 jumlah anev pelaksanaan perda yang telah ditindaklanjuti oleh pemda Penyebab tercapai : Terwujudnya pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama kesiapan strategi, pembagian peran yang jelas, serta komitmen dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Strategi tindak lanjut yang dirancang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara

						terintegrasi sangat penting agar rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara efektif. Analisa strategi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah : Kanwil Kementerian Hukum menerapkan strategi yang terstruktur dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Strategi utama meliputi pembentukan tim kerja yang komprehensif, rapat internal, serta pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk memastikan hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara efektif. Tingkat realisasi rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan, Terjadinya perbaikan layanan publik atau peningkatan efektivitas kebijakan akibat pelaksanaan rencana tindak lanjut, dan Kepatuhan terhadap regulasi nasional dan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
		Realisasi IKU $= \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total jumlah anev pelaksanaan perda yang disampaikan kepada pemda}} \times$ $= 6/8 \times 100\% = 75\%$				
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	85,62 %	$85,62\%/88\% \times 100\% = 97,29\%$ (Belum mencapai target)	Belum tercapainya target capaian layanan bantuan hukum di wilayah sejalan dengan penyerapan DIPA BPHN yang belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya gangguan teknis pada aplikasi SIDBANKUM sebagai sumber data, yang mengakibatkan data permohonan layanan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober terhapus, sehingga berdampak pada pemberian layanan bantuan hukum yang belum optimal.

						Saat ini Kantor Wilayah masih memproses permohonan bantuan hukum hingga akhir batas waktu pencairan sehingga realisasi masih dimungkinkan bertambah.
		Realisasi IKU = $\frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi^non litigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi^non litigasi) yg diminta}} \times 100\%$ = 2964/3462 x 100% = 85,62%				
	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	(50/80) x 100% = 62,5% (tercapai target)	62,5%/50% x 100% = 125% (capaian melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Anggota JDIHN Jawa Timur digelar secara <i>daring</i> dihadiri sebanyak 42 instansi. Sementara itu 80 merupakan jumlah anggota JDIH di Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya Kanwil dalam melakukan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah agar bisa <u>tercapai</u> sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam kegiatan tersebut juga diperkenankan melakukan pengelolaan dokumentasi secara luring. Pembinaan pengelolaan dokumen secara <i>luring</i> telah dilaksanakan dengan 8 instansi hingga awal Desember 2025.
		Realisasi IKU = $\frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yg diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yg diterima}} \times 100\%$ = (42+8)/80 x 100% = 62,5%				
	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total	10%	100%	100%/10% x 100% = 1000% (tercapai 10x lipat melebihi target)	1. Capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan, di mana target awal sebanyak 849 Posbankum telah berkembang menjadi 8.494 Posbankum. Jumlah tersebut

		desa/ kelurahan			Normalisasi Capaian PK = 110%	setara dengan 100% dari total Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. 2. Penyebab tercapai : Peningkatan capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam membangun kolaborasi dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota. 3. Analisa strategi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah : Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperluas pemenuhan serta pemerataan akses keadilan bagi masyarakat hingga pada tingkat akar rumput. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan meliputi penyampaian informasi, pendampingan teknis, serta pemantauan perkembangan capaian di masing-masing wilayah.
		$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yg memiliki posbankum atau posbankum yg dibina serta aktif}}{\text{Total jumlah desa atau kelurahan diwilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$ = 8.494/8.494 x 100% = 100%				
Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) (1 Sasaran, 1 Indikator)	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindakan Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	100%/95% x 100% = 105% (capaian melebihi target)	Pada tahun 2025 ini Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Jatim telah menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan terdiri dari 2 kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sipkumham, 1 kegiatan Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM, dan 1 kegiatan analisis implementasi strategi kebijakan Peraturan

						Menteri Hukum. Dari 4 (empat) rekomendasi kebijakan hukum yang telah dihasilkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya. Keberhasilan capaian indikator <i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</i> sebesar 100% didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat, komitmen pimpinan, koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi 3AS dan monitoring internal yang memudahkan pelaksanaan dan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat.
	Realisasi IKU = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi strategi kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$ = 4/4 x 100% = 100%					
Balai Harta Peninggalan Surabaya (BHP) (2 Sasaran, 3 Indikator)	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan BHP	98,1%	99,36%	99,36%/98,1% x 100% = 101,28% (capaian melebihi target)	Sampai dengan akhir November 2025, dari total 316 permohonan layanan yang masuk, 221 permohonan SKHW dan pendaftaran wasiat telah selesai, dan 93 layanan perwalian, pengampuan, afwezigheid, dan kepailitan telah ditindaklanjuti. BHP Surabaya dapat mencapai target indikator ini karena komitmen penyelesaian pelayanan oleh seluruh pegawai, koordinasi intensif dengan instansi terkait, serta optimalisasi teknologi informasi.
	Realisasi IKU = $\frac{\text{Jumlah permohonan layanan BHP yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100\%$ = (221+93)/316 x 100% = 314/316 x 100% = 99,36%					

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%/100% 100% = 100% (Tercapai)	Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di BHP Surabaya sampai dengan B12 tercapai 146 kegiatan dari 146 target output kegiatan. Hal ini sejalan dengan komitmen pembangunan zona integritas yang dapat dimonitoring pada laman erb.kemenkum.go.id , peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, serta bimbingan dari Kanwil dan Ditjen AHU dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BHP Surabaya.
	Realisasi IKU = $\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total rencana aksi RB BHP}} \times 100\%$ = 146/146 x 100% = 100%				
	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,82 indeks	3,82/3,1x100 % = 123% (capaian melebihi target) Normalisasi Capaian PK = 110%	Hasil survey ILK BHP Surabaya oleh BSK Semester I 2025 mencapai 3,79 indeks dari 32 pegawai pengisi survey. Survey ILK Semester II 2025 telah dilaksanakan dan mencapai nilai indeks 3,85. Sehingga diperoleh rata-rata nilai ILK 3,82 Sangat Baik (A). Subbagian umum melaksanakan evaluasi pelayanan internal terkait bagian tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan umum secara berkala. Kemudian juga internalisasi layanan kesekretariatan kepada seluruh pegawai, lalu menerima feedback kritik dan saran. Sehingga target ini dapat tercapai.
	Hasil Survey BSK				

15 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Penilaian Kinerja Organisasi

Selanjutnya atas Capaian PK tersebut dilakukan perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sesuai dengan **permenpanrb no 22 tahun 2024**.

Adapun berdasarkan permenpanrb no 22 tahun 2024, bahwa terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (i) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- (ii) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana berikut :

Oleh karena Nilai SAKIP Kantor Wilayah Jawa Timur mendapatkan nilai **85,39 atau kategori A (Memuaskan)**, maka koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 0%.

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2), sebagai berikut :

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)		Nilai Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1)* (100% -(2))
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	0	100%
2	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Kanwil	99,7%	99,7%	0	99,73%
3	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	100%	100%	0	100%
4	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris	101,94%	101,94%	0	101,94%

	dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah				
5	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	116,7%	110%	0	110%
6	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	333%	110%	0	110%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di Wilayah	140,86%	110%	0	110%
8	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undang an di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	0	100%
9	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undang an di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	0	100%
10	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di	750%	110%	0	110%

	Wilayah Kerja Kanwil				
11	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	97,29%	97,29%	0	97,29%
12	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	125%	110%	0	110%
13	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/ kelurahan	1000%	110%	0	110%
14	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105%	105%	0	105%
15	Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan BHP	101,28%	101,28%	0	101,28%
16	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	0	100%
17	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	123%	110%	0	110%
Total Capaian PK					1.775,6%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK					104,45
Predikat PKO					ISTIMEWA

SCREEN CAPTURE PENGISIAN APLIKASI E-PERFORMANCE TW IV
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR TAHUN 2025

Sekjen

PERFORMANCE 2025						
Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Renaksi PK Mini Menu					peningkatan kinerja sdm	
	September	25	Rp744.266.548	4.53%	terlaksananya kegiatan supervisi pagu anggaran, monev BMN likuidasi, dan lay peningkatan kinerja SDM, Monev RKT RB dan SPIP	edit
	Oktober	0	Rp846.527.299	5.16%	terlaksananya monev gratifikasi dan benturan kepentingan, monev BMN dan peningkatan kinerja lay SDM dan RB	edit
	November	0	Rp846.527.299	5.16%	terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja lay sdm dan rb	edit
	Desember	25	Rp768.512.322	4.68%	terlaksananya kegiatan siber, pekppp dan layanan kantor serta pengelolaan sdm, dan rakor pengendalian kinerja	edit

Divisi Pelayanan Hukum (AHU dan KI)

KI

	Pagu	Realisasi	
	Rp152.821.000	Rp138.975.650	90.94%
			Rp13.845.350

Bulan	Realisasi Target	Realisasi Pagu		Keterangan
		Jumlah	Persentase	
Januari	0	Rp0	0.00%	Menyusun tim kerja layanan kekayaan intelektual di wilayah
Februari	0	Rp0	0.00%	Menunggu pedoman tarja DJKI
Maret	0	Rp0	0.00%	Rapat koordinasi internal dengan pimpinan untuk peningkatan pemahaman KI bagi masyarakat
April	0	Rp0	0.00%	Rapat koordinasi internal dengan pimpinan untuk peningkatan pemahaman KI bagi masyarakat
Mei	10	Rp72.872.000	47.68%	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tahun tematik hak cipta desain industri
Juni	10	Rp14.682.500	9.61%	Terlaksananya kegiatan Promosi dan Diseminasi Desain Industri
Juli	10	Rp18.842.000	12.33%	Terlaksananya kegiatan pendampingan, fasilitasi dan konsultasi inventarisasi kekayaan intelektual komunal
Agustus	10	Rp0	0.00%	Rapat evaluasi internal dengan pimpinan untuk peningkatan pemahaman KI bagi masyarakat
September	10	Rp10.000.000	6.54%	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pameran IFBC Expo
Oktober	10	Rp21.079.150	13.79%	Terlaksananya talkshow KI melalui radio
November	5	Rp1.500.000	0.98%	Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru KI)
Desember	0	Rp0	0.00%	

**Pagu**

Rp513.181.000

Realisasi

Rp299.677.337

58.40%

Rp213.503.663

Bulan	Realisasi Target	Realisasi Pagu		Keterangan	
		Jumlah	Persentase		
Januari	0	Rp0	0.00%	Menyusun tim kerja layanan kekayaan intelektual di wilayah	
Februari	0	Rp0	0.00%	Menunggu pedoman tarja DJKI	
Maret	2	Rp64.348.825	12.54%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran layanan kekayaan intelektual di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
April	2	Rp23.020.484	4.49%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran layanan kekayaan intelektual di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
Mei	2	Rp15.261.000	2.97%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran layanan kekayaan intelektual di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
Juni	2	Rp108.131.904	21.07%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran layanan kekayaan intelektual di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
Juli	2	Rp18.787.930	3.66%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran layanan kekayaan intelektual di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
Agustus	2	Rp46.875.694	9.13%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
September	2	Rp0	0.00%	Rapat Evaluasi Internal terkait Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	
Oktober	2	Rp8.990.500	1.75%	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran layanan kekayaan intelektual di wilayah, serta belanja layanan heldesk 2 org	
November	2	Rp14.261.000	2.78%	Telah dilaksanakan pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	
Desember	0	Rp0	0.00%		

	Pagu	Realisasi		
	Rp19.100.000	Rp15.606.000	81.71%	Rp3.494.000

Bulan	Realisasi Target	Realisasi Pagu		Keterangan	
		Jumlah	Persentase		
Januari	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
Februari	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
Maret	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
April	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
Mei	10	Rp5.250.000	27.49%	Telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan kekayaan intelektual	
Juni	5	Rp3.305.500	17.31%	Telah dilaksanakan pendampingan aduan pelanggaran merek	
Juli	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
Agustus	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
September	0	Rp0	0.00%	Belum adanya aduan pelanggaran KI	
Oktober	5	Rp5.177.500	27.11%	Telah dilaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Wilayah	
November	5	Rp1.873.000	9.81%	Telah dilaksanakan Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	
Desember	0	Rp0	0.00%		

AHU

PERFORMANCE 2025



Maret	0	Rp0	0.00%	Pencairan pelaksanaan kegiatan menunggu Revolving GU sesuai DIPA	edit
April	0	Rp0	0.00%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
Mei	0	Rp0	0.00%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
Juni	0	Rp138.447.148	2.75%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
Juli	0	Rp154.349.848	3.06%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
Agustus	0	Rp154.349.848	3.06%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
September	0	Rp374.125.748	7.43%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
Oktober	0	Rp25.163.900	0.50%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
November	0	Rp88.800.000	1.76%	Terlaksananya sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	edit
Desember	0	Rp0	0.00%		edit

Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum (PP, BSK, BPHN)

BPHN (DSH, BANKUM LITIGASI, BANKUM NON LITIGASI, JDIH)

DSH

LAPORAN E - PERFORMANC

E-Performance - Capaian K

(28) WhatsApp

AI Ghazali Ft Chelsea - K

SID Bankum - Error

performance.kemenkumham.go.id/index.php/capaian/kegiatan/kinerja/input_capaian_indikator/185dbe18-e43f-11ef-8524-00505695cdc9/183ec071-e43f-1...

All Bookmarks

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

Mini Menu

Oktober	4	Rp708.000	0.46%	rangka upaya percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini meliputi penyampaian informasi, pendampingan teknis, serta pemantauan perkembangan capaian di masing-masing wilayah.	edit
November	0	Rp0	0.00%	Pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten/Kota (Kab. Bangkalan, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan) dalam rangka upaya percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini meliputi penyampaian informasi, pendampingan teknis, serta pemantauan perkembangan capaian di masing-masing wilayah.	edit
Desember	0	Rp0	0.00%	Capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan, di mana target awal sebanyak 849 Posbankum telah berkembang menjadi 8.494 Posbankum. Jumlah tersebut setara dengan 100% dari total Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.	edit

Windows taskbar with icons for File Explorer, Google Chrome, and other applications.

System tray showing date 18/12/2025, time 12:44, and network status.

BANKUM LITIGASI

LAPORAN E - PERFORMANCE

E-Performance - Capaian Kinerja

(28) WhatsApp

Merpati - Tak Rela (Official)

SID Bankum - Error

performance.kemenkumham.go.id/index.php/capaian/kegiatan/kinerja/input_capaian_indikator/185dc1f1-e43f-11ef-8524-00505695cdc9/183ebfdd-e43f-11ef-8524-00505695cdc9

All Bookmarks

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

Mini Menu

September	27	Rp720.000.000	12.99%	Jumlah Layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan sebanyak 179 permohonan diterima dari 672 total permohonan bantuan hukum litigasi (data per 24 September 2025)	edit
Oktober	34	Rp1.898.700.000	34.25%	Jumlah Layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan sebanyak 156 permohonan diterima dari 456 total permohonan bantuan hukum litigasi (data per 05 November 2025)	edit
November	0	Rp0	0.00%	Belum tercapainya target capaian layanan bantuan hukum di wilayah sejalan dengan penyerapan DIPA BPHN yang belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya gangguan teknis pada aplikasi SIDBANKUM sebagai sumber data, yang mengakibatkan data permohonan layanan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober terhapus, sehingga berdampak pada pemberian layanan bantuan hukum yang belum optimal.	edit
Desember	0	Rp0	0.00%		edit

Windows

Taskbar icons

System tray

12:40
18/12/2025

BANKUM NON LITIGASI

PERFORMANCE 2025

- Beranda
- CAPAIAN KINERJA
 - Sasaran Kegiatan
 - Perjanjian Kinerja
- RENCANA AKSI
 - Renaksi PK

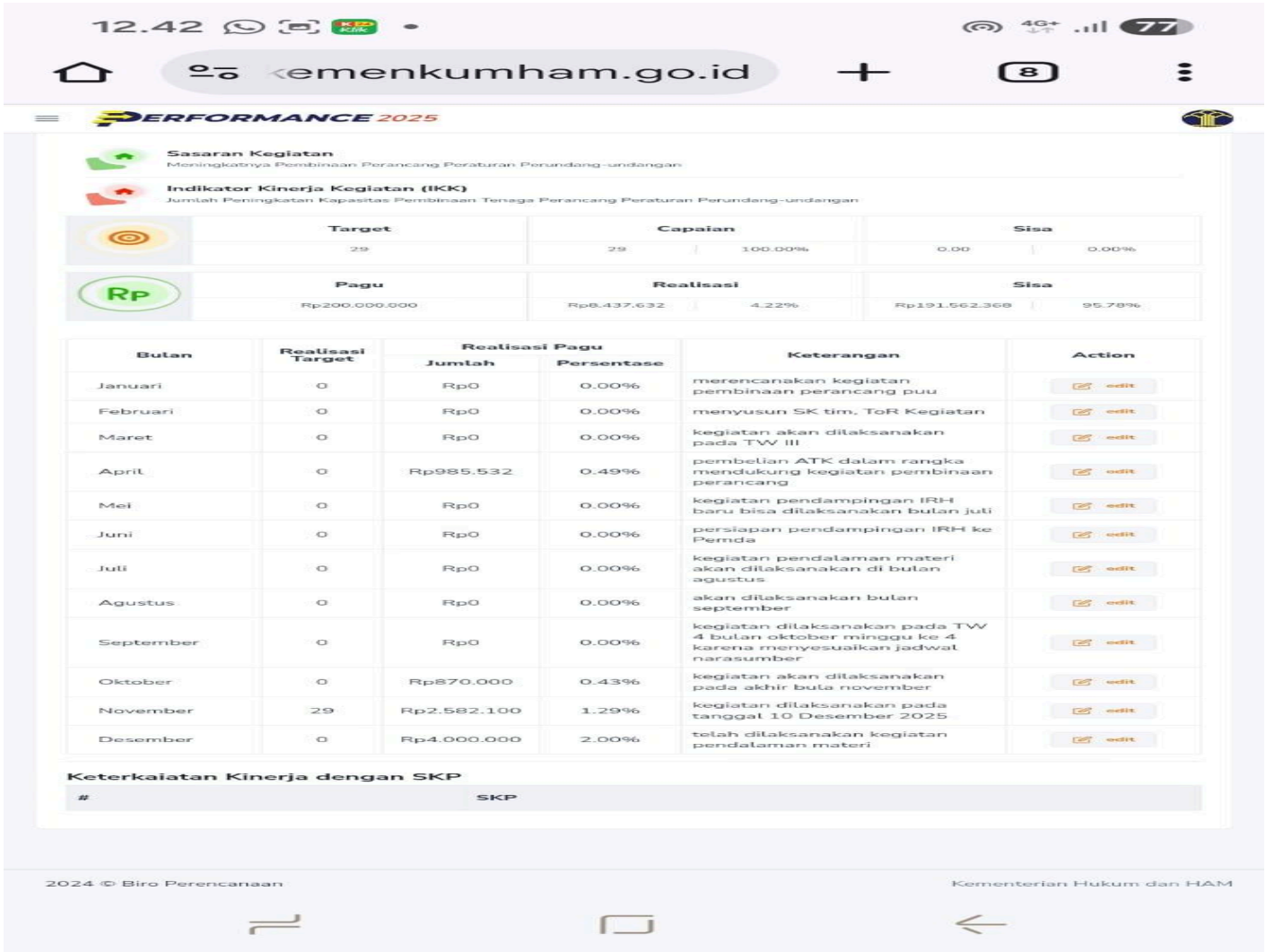
Tahun	Kategori	Target	Aktual	Persentase	Detail	Aksi	
2025	Bantuan Hukum Non Litigasi	September	42	Rp56.740.000	5.02%	Jumlah Layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan sebanyak 64 permohonan diterima dari 153 total permohonan bantuan hukum non litigasi	edit
		Oktober	27	Rp102.646.000	9.08%	Jumlah Layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan sebanyak 48 permohonan diterima dari 176 total permohonan bantuan hukum non litigasi	edit
		November	0	Rp0	0.00%	Belum tercapainya target capaian layanan bantuan hukum di wilayah sejalan dengan penyerapan DIPA BPHN yang belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya gangguan teknis pada aplikasi SIDBANKUM sebagai sumber data, yang mengakibatkan data permohonan layanan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober terhapus, sehingga berdampak pada pemberian layanan bantuan hukum yang belum optimal.	edit
		Desember	0	Rp0	0.00%		edit

← Mini Menu

PERFORMANCE 2025

Beranda	CAPAIAN KINERJA	Sasaran Kegiatan	Perjanjian Kinerja	RENCANA AKSI	Renaksi PK	
					Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian e-report semesteran secara daring terhadap anggota JDIHN yang ada di Jawa Timur sebagai tindak lanjut arahan BPHN terhadap anggota JDIHN	
		Agustus	10	Rp0	0.00%	edit
		September	15	Rp0	0.00%	edit
		Oktober	0	Rp0	0.00%	edit
		November	0	Rp0	0.00%	edit
		Desember	0	Rp0	0.00%	edit

PP



12.39



4G+ 78



emenkumham.go.id



PERFORMANCE 2025



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR - Capaian Kinerja Kegiatan

Sasaran Program > Indikator



Sasaran Kegiatan

Tertfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

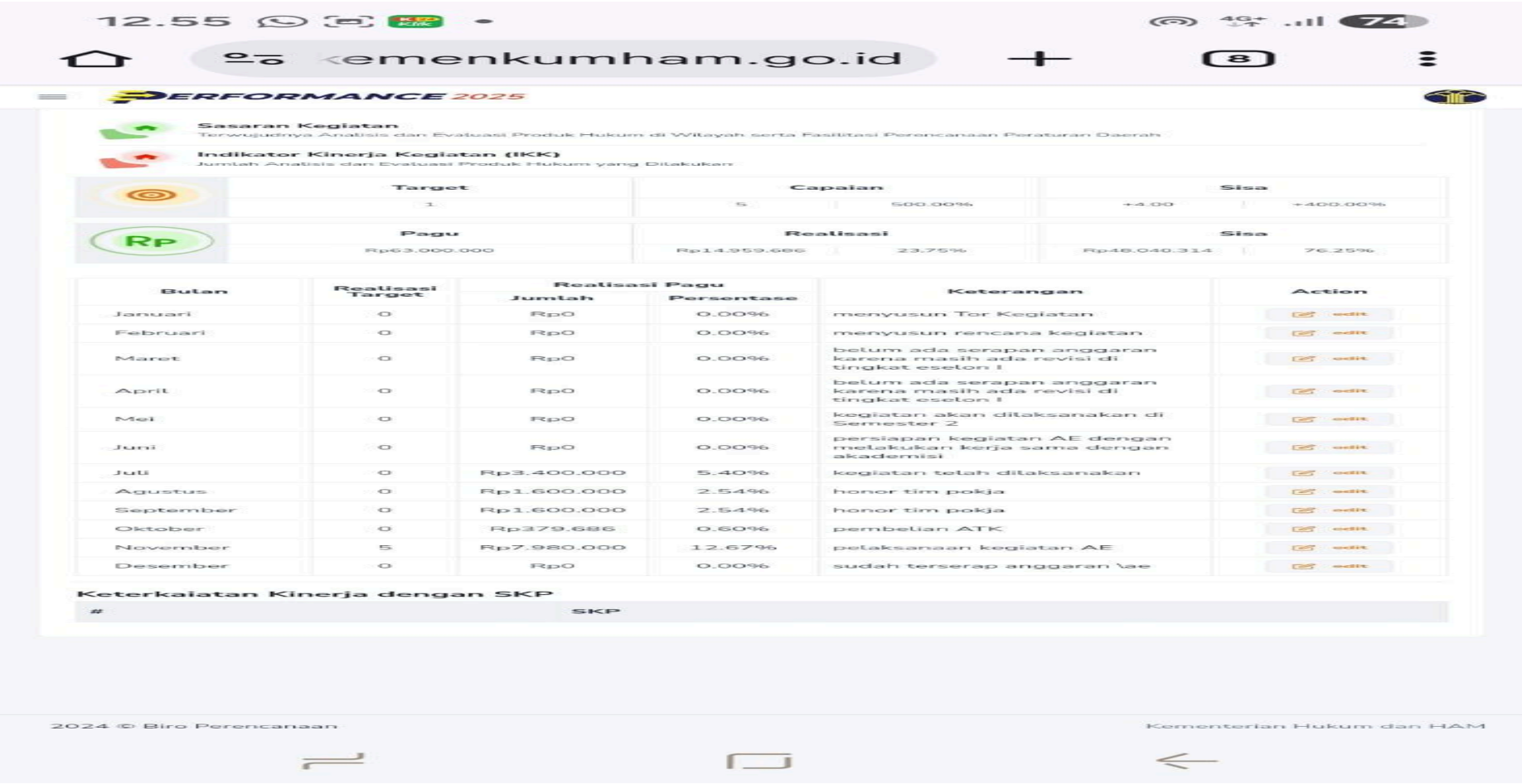
Target	Capaian	Sisa
80	80 100.00%	0.00 0.00%
Pagu	Realisasi	Sisa
Rp373.000.000	Rp186.396.501 50.13%	Rp186.603.499 49.87%

Bulan	Realisasi Target	Realisasi Pagu		Keterangan	Action
		Jumlah	Persentase		
Januari	0	Rp0	0.00%	penyusunan perencanaan kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum daerah	edit
Februari	0	Rp0	0.00%	kegiatan harmonisasi raperda/raperkada sudah dilaksanakan	edit
Maret	20	Rp7.580.000	2.03%	telah dilaksanakan harmonisasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah	edit
April	0	Rp11.424.001	3.06%	telah dilaksanakan harmonisasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah	edit
Mei	0	Rp36.531.000	9.79%	telah dilaksanakan harmonisasi dan masih proses pertanggungjawaban	edit
Juni	20	Rp37.820.000	10.14%	telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi raperda/raperkada	edit
Juli	0	Rp7.580.000	2.03%	telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi raperda	edit
Agustus	0	Rp13.220.000	3.54%	telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi raperda	edit
September	20	Rp19.020.000	5.10%	telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi raperda	edit
Oktober	0	Rp1.860.000	0.50%	telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi raperda dan mediasi konsultasi	edit
November	20	Rp13.261.500	3.56%	telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi raperda dan mediasi konsultasi	edit
Desember	0	Rp38.700.000	10.38%	telak dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan pendalaman materi perancang	edit

Keterkaitan Kinerja dengan SKP



AE



BSK

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Renaksi PK

Mini Menu

Januari	0	Rp0	0.00%	Menyusun SK Tim SIPKUMHAM, IRH, SPKP/SPAK	edit
Februari	0	Rp0	0.00%	Menunggu pedoman BSK	edit
Maret	0	Rp3.240.000	3.24%	Telah terlaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	edit
April	0	Rp4.498.600	4.50%	Telah terlaksana pelaksanaan pendampingan penilaian mandiri IRH pada Pemerintah Daerah Kota Malang	edit
Mei	0	Rp18.305.528	18.31%	Telah terlaksana pelaksanaan pendampingan penilaian mandiri IRH pada Pemerintah Daerah Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kab. tulungagung, Kota Probolinggo	edit
Juni	0	Rp24.483.740	24.48%	Pengumpulan Data AIEK dan Koordinasi dan Konsultasi ke BSK Hukum terkait SIPKUMHAM	edit
Juli	1	Rp4.707.000	4.71%	Rekomendasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei SPKP-SPAK	edit
Agustus	1	Rp11.088.620	11.09%	Laporan hasil Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di wilayah	edit
September	1	Rp4.690.000	4.69%	Diskusi Strategi Kebijakan dengan topik "Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris", dan Unggah RTL SIPKUMHAM	edit
Oktober	1	Rp12.819.000	12.82%	Analisis dengan pemanfaatan SIPKUMHAM mengambil tema terkait Juru Parkir Liar yang ada pada Kota Malang	edit
November	0	Rp11.009.353	11.01%	Koordinasi dan Konsultasi dengan BSK kementerian Hukum terkait pelaksanaan kinerja TA. 2026	edit
Desember	0	Rp4.166.050	4.17%	Koordinasi dan Konsultasi dengan BSK kementerian Hukum	edit

D. Simpulan dan Rekomendasi :

- **Simpulan**

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur telah melaksanakan upload data dukung Percepatan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025 pada E - Performance.
- Kantor Wilayah telah menyusun Laporan Evaluasi Mandiri Percepatan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025.

- **Rekomendasi**

- Setiap divisi perlu menindaklanjuti sesuai Evaluasi Mandiri Percepatan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025 agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.

E. Penutup

Laporan ini dibuat sebagai bahan Evaluasi Mandiri Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Tahun 2025 serta untuk strategi pencapaian target kinerja periode selanjutnya.

Surabaya, 15 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah



Haris Sukanto
NIP 196606051989111001